



Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

Laporan Kinerja Triwulan II Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XVI Gorontalo Tahun 2025

Berikut ini kami sampaikan hasil capaian kinerja pada Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XVI Gorontalo selama Triwulan II tahun 2025.

A. Progress Capaian Kinerja

Sasaran/Indikator	Target PK	Satuan	TW II	
			Target	Realisasi
[S 1] Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)				
[IKU 1.1] Kepuasan pengguna terhadap layanan utama LLDIKTI	99.8	%	0	0
[IKU 1.2] Persentase PTS yang terakreditasi atau meningkatkan mutu dengan cara penggabungan dengan PTS lain	78	%	0	0
[S 2] Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi				
[IKU 2.1] Persentase PTS yang menyelenggarakan kegiatan pembelajaran di luar program studi	61.9	%	0	0
[IKU 2.2] Persentase mahasiswa S1 atau D4/D3/D2/D1 PTS yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi	2.63	%	0	0
[IKU 2.3] Persentase PTS yang mengimplementasikan kebijakan antiintoleransi, anti kekerasan seksual, antiperundungan, antinarkoba, dan antikorupsi	95.2	%	0	0
[S 3] Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan				
[IKU 3.1] Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan di luar kampus	25	%	0	0
[IKU 3.2] Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra	57.14	%	0	0
[S 4] Meningkatnya tata kelola Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)				
[IKU 4.1] Predikat SAKIP	BB	Predikat	-	-
[IKU 4.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L	91	Nilai	0	0



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik

B. Analisis Hasil Capaian Kinerja

[S 1] Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)

[IKU 1.1] Kepuasan pengguna terhadap layanan utama LLDIKTI

Progress/Kegiatan

Peningkatan kualitas layanan terus diperbaiki. Peningkatan ini akan sangat mempengaruhi kepuasan pengguna layanan. Pada triwulan kedua ini LLDIKTI XVI lebih kepada peningkatan sistem layanan melalui aplikasi dasbor, SIPINTER dan helpdesk, dan monitoring survey kepuasan pengguna atas pelayanan yang diberikan. Selain itu, LLDIKTI XVI juga mulai menyusun Prosedur Operasional Standar Administrasi Pemerintahan (POS AP) sebagai upaya menciptakan efisiensi, efektivitas, dan kualitas pelayanan publik yang lebih baik.

Kendala/Permasalahan

Terbatasnya ketersediaan infrastruktur server yang dikarenakan regulasi yang melarang pengadaan server mandiri di satuan kerja. Selain itu, penggunaan server Kominfo juga memiliki banyak keterbatasan dari segi birokrasi sehingga membutuhkan lebih lama untuk menyelesaikan satu aplikasi. Sedangkan untuk POS AP, ketiadaan pelatihan yang optimal mengenai penyusunan POS AP menyebabkan pegawai yang ditugaskan belum memahami tugas dan fungsi mereka secara jelas dalam konteks standar yang baru.

Strategi/Tindak Lanjut

Menambah SDM yang berkompeten dibidang SPBE dan bidang penyusunan POS AP, serta melakukan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi standar pelayanan. Selain itu parameter penilaian untuk Tingkat kepuasan pengguna akan dibuat lebih terperinci.

[S 1] Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)

[IKU 1.2] Persentase PTS yang terakreditasi atau meningkatkan mutu dengan cara penggabungan dengan PTS lain

Progress/Kegiatan

Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja perguruan tinggi yang mempengaruhi proses akreditasi serta melakukan pemantauan dan pendataan pada Perguruan Tinggi yang sudah habis atau mendekati masa kadaluwarsa akreditasi baik perguruan tinggi maupun program studi.

Di Triwulan II, LLDIKTI Wilayah XVI melaksanakan kegiatan Workshop Strategi Peningkatan Akreditasi Unggul dan Internasional Perguruan Tinggi Swasta untuk mendorong transformasi menyeluruh dalam sistem pendidikan tinggi. selain itu kegiatan ini juga bertujuan untuk mendorong implementasi SPMI yang lebih efektif dan berkelanjutan di setiap program studi melalui siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan) sebagai dasar akreditasi unggul dan internasional.

Kendala/Permasalahan

Proses Akreditasi perguruan tinggi yang cukup lama salah satunya dikarenakan oleh migrasi Akun Sapto dari 1.0 menjadi Sapto 2.0 yang kurang tersosialisasi ke PTS. Selain itu kendala lain adalah terbatasnya komunikasi antara perguruan tinggi pengusul dengan BAN- PT atau LAM. PTS diwilayah LLDIKTI XVI juga masih butuh kerja ekstra untuk meningkatkannya dikarenakan sebagian besar PTS masih terakreditasi baik.



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

Strategi/Tindak Lanjut

Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi secara berkala terhadap status akreditasi baik program studi maupun perguruan tinggi serta melakukan pemantauan terkait progress pengajuan akreditasi pada sistem SAPTO 2.0.

[S 2] Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi

[IKU 2.1] Persentase PTS yang menyelenggarakan kegiatan pembelajaran di luar program studi

Progress/Kegiatan

Pemantauan laporan IKU PTS melalui PDDIKTI terus dilakukan sejalan dengan melakukan identifikasi PTS yang telah mengimplementasikan pembelajaran lintas prodi.

Kendala/Permasalahan

Belum semua PTS memiliki kesiapan administrative dan akademik dalam menyusun kurikulum lintas prodi. Selain itu, sebagian dosen masih memerlukan peningkatan kompetensi dalam pengelolaan pembelajaran kolaboratif.

Adanya pemisahan Kementerian yang semula Kemendikburistek menjadi Kemendiktisaintek, menjadikan beberapa program masih belum bisa dilakukan dan menunggu rencana strategis serta program-program yang akan menjadi unggulan dalam pelaksanaan transformasi pendidikan tinggi.

Strategi/Tindak Lanjut

Mengintensifkan monitoring pelaporan IKU PTS. Serta mempersiapkan program-program yang mendukung kebijakan terbaru dari Kemendiktisaintek.

[S 2] Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi

[IKU 2.2] Persentase mahasiswa S1 atau D4/D3/D2/D1 PTS yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi

Progress/Kegiatan

Pemantauan laporan IKU PTS melalui PDDIKTI terus dilakukan sejalan dengan melakukan identifikasi PTS yang telah mengimplementasikan pembelajaran lintas prodi.

Kendala/Permasalahan

Belum semua PTS memiliki kesiapan administrative dan akademik dalam menyusun kurikulum lintas prodi. Selain itu, sebagian dosen masih memerlukan peningkatan kompetensi dalam pengelolaan pembelajaran kolaboratif.

Adanya pemisahan Kementerian yang semula Kemendikburistek menjadi Kemendiktisaintek, menjadikan beberapa program masih belum bisa dilakukan dan menunggu rencana strategis serta program-program yang akan menjadi unggulan dalam pelaksanaan transformasi pendidikan tinggi.

Strategi/Tindak Lanjut

Mengintensifkan monitoring pelaporan IKU PTS. Serta mempersiapkan program-program yang mendukung



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

kebijakan terbaru dari Kemendiktisaintek.

[S 2] Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi

[IKU 2.3] Persentase PTS yang mengimplementasikan kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, antinarkoba, dan antikorupsi

Progress/Kegiatan

Adanya perubahan dari PPKS menjadi PPKPT dengan hadirnya Permendikbudristek Nomor 55 tahun 2024 yang menggantikan Permendikburistek nomor 30 tahun 2021 yang memiliki cakupan lebih luas dibandingkan PPKS yang fokus hanya pada kekerasan seksual. Untuk itu LLDIKTI Wilayah XVI terus memonitoring implementasi regulasi dan laporan kegiatan kekerasan di Kampus.

Kendala/Permasalahan

Saat ini LLDIKTI XVI belum mendapatkan pelaporan terkait jumlah PTS yang sudah membuat regulasi PT tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkup perguruan tinggi.

Strategi/Tindak Lanjut

Mendorong PTS untuk melaporkan regulasi PPKPT yang sudah disahkan di PTSnya masing-masing.

[S 3] Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan

[IKU 3.1] Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan di luar kampus

Progress/Kegiatan

Untuk peningkatan persentasi jumlah dosen yang berkegiatan diluar kampus, LLDIKTI XVI terus mendorong dosen untuk selalu melakukan pemutakhiran data dosen pada SISTER dan PDDIKTI.

Kendala/Permasalahan

Pelaporan kegiatan dosen yang berkegiatan diluar kampus hanya dilaporkan melalui SISTER, sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama dalam mengumpulkan pelaporan data dosen.

Strategi/Tindak Lanjut

Mengajak Pimpinan PTS untuk berperan aktif memastikan pemutakhiran data dosen dapat terlaksana secara berkala.

[S 3] Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan

[IKU 3.2] Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra

Progress/Kegiatan



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

Melaksanakan monitoring terhadap pelaporan Kerjasama PTS dengan mitra melalui aplikasi LAPORKERMA. LLDIKTI Wilayah XVI juga melakukan pendampingan secara berkelanjutan kepada operator LAPORKERMA.

Kendala/Permasalahan

Dalam proses pelaporan Kerjasama, masih terdapat PTS yang belum melaporkannya melalui aplikasi LAPORKERMA. Lemahnya akses menjalin Kerjasama baik dengan Perguruan Tinggi Unggul dan DUDI juga menjadi salah satu kendala PTS.

Strategi/Tindak Lanjut

Fasilitasi PTS untuk melakukan kunjungan mitra dalam rangka menindaklanjuti MoU yang sudah disepakati. Selain itu, untuk pelaporan dokumen kerja sama, LLDIKTI akan melakukan monitoring dan pendampingan bagi PTS yang memiliki kendala pada pelaporan.

[S 4] Meningkatkan tata kelola Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)

[IKU 4.1] Predikat SAKIP

Progress/Kegiatan

Telah dilaksanakan Kegiatan rapat Evaluasi Capaian Kinerja Triwulan I, FGD Penyusunan dan Pemantapan Prioritas Program Kerja Tahun 2026

Kendala/Permasalahan

Keterlambatan dalam penyusunan RENSTRA berpengaruh pada realisasi capaian output satker.

Strategi/Tindak Lanjut

Melakukan optimalisasi capaian output dengan melaksanakan kegiatan pengganti agar capaian realisasi kegiatan tetap maksimal

[S 4] Meningkatkan tata kelola Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)

[IKU 4.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L

Progress/Kegiatan

Melakukan koordinasi intensif dengan KPPN dan Kanwil DjPb Gorontalo terkait percepatan pelaksanaan anggaran serta peningkatan nilai IKPA Satker

Kendala/Permasalahan

Capaian indikator IKPA pada penyerapan anggaran tidak tercapai maksimal disebabkan masih memerlukan revisi penyesuaian anggaran pasca eisiensi.

Strategi/Tindak Lanjut

Menyusun strategi pelaksanaan anggaran dengan melakukan penyesuaian dan percepatan pelaksanaan kegiatan di triwulan II untuk memenuhi penyerapan anggaran



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**


C. Realisasi Fisik dan Anggaran per-Rincian Output

No	Rincian Output	Satuan	Fisik		Anggaran		
			Target	Realisasi	Alokasi	Realisasi	%
1	[DK.7733.BDB.001] Lembaga Pendidikan Tinggi Akademik dan Vokasi yang mendapatkan layanan pembinaan peningkatan mutu	Lembaga	44	77	Rp4.515.149.000	Rp1.508.985.149	33.42
2	[DK.7733.BDB.002] Lembaga Pendidikan Tinggi Akademik dan Vokasi yang mendapat layanan rekomendasi	Lembaga	11	18	Rp43.650.000	Rp19.214.780	44.02
3	[DK.7733.BEJ.001] Dosen Non PNS yang Menerima Tunjangan Profesi	Orang	1540	1541	Rp54.226.064.000	Rp39.045.600.900	72.01
4	[WA.7735.EBA.956] Layanan BMN	Layanan	0	2	Rp9.133.000	Rp6.095.000	66.74
5	[WA.7735.EBA.962] Layanan Umum	Layanan	0	0	Rp559.434.000	Rp298.694.813	53.39
6	[WA.7735.EBA.994] Layanan Perkantoran	Layanan	0	0	Rp23.131.210.000	Rp19.157.781.709	82.82
Total Anggaran					Rp82.484.640.000	Rp60.036.372.351	72.78

D. Rekomendasi Pimpinan

1. **Segera lakukan inventarisasi kebutuhan infrastruktur digital** yang kritikal, dan susun rencana prioritas pengadaan atau peningkatan kapasitas server dan jaringan.
2. **Perkuat kolaborasi lintas lembaga**, khususnya dengan instansi pusat atau perguruan tinggi mitra, untuk mendukung pelatihan SDM teknis serta berbagai infrastruktur sementara.
3. **Laksanakan pelatihan SPBE secara berjenjang**, dengan fokus pada kemampuan troubleshooting dan optimalisasi aplikasi layanan publik.
4. **Evaluasi efektivitas perbaikan layanan yang telah dilakukan**, terutama terkait kecepatan respon dan kepuasan pengguna, untuk memastikan arah perbaikan tetap sesuai target IKU.

Gorontalo , 7 November 2025

	Ditandatangani secara elektronik oleh Kepala LLDIKTI Wil. XVI Munawir Sadzali Razak
---	---



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE